



**PENYULUHAN KEBIJAKAN RELAKSASI KREDIT DAN PENGAWASAN INTERNAL DI
LPD TINGKATBATU, KABUPATEN BANGLI**

Counseling of Credit Relaxation Policy and Internal Monitoring on LPD Tingkatbatu, Bangli District

Putu Ayu Pramitha Purwanti¹, I Made Endra Kartika Yudha¹, Wayan Wenagama¹, I Putu Suhartika², Ni Putu Premierita Haryanti², Putu Krisna Adwitya Sanjaya¹, I Wayan Gita Ayu Kusuma¹, I Wayan Dipa Sudiksa¹, Kadek Dinda Mas Kencana Dewi¹

¹Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana, ²Program Studi Perpustakaan Universitas Udayana

Jalan P. B. Sudirman, Denpasar, Bali

Alamat Korespondensi: kartikayudha@unud.ac.id

(Tanggal Submission: 10 November 2023, Tanggal Accepted : 5 Januari 2024)



Kata Kunci :

*Penyuluhan,
Relaksasi
Kredit,
Pengawasan
Internal*

Abstrak :

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) merupakan lembaga keuangan yang dimiliki dan dikelola desa adat di Desa Tingkatbatu, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali. LPD telah lama memberikan dukungan kepada masyarakat desa yang kesulitan mendapatkan akses lembaga keuangan seperti bank karena kendala jaminan atau laporan keuangan. Kredit macet dan pengawasan internal adalah isu penting apalagi pada masa pandemi, sehingga ini menjadi tantangan dari LPD tersendiri karena trend kredit macet mengalami peningkatan. Kegiatan PKM ini bertujuan untuk memberikan pemahaman bagi pengelola terkait pelaksanaan relaksasi kredit bagi debitur LPD Tingkatbatu, memberikan pemahaman dan pengalaman bagi bagi pengawas untuk melaksanakan pengawasan internal berupa audit sederhana, memberikan pendampingan pelaksanaan relaksasi dan pengawasan internal dengan melaksanakan audit sederhana. Adapun Metode pelaksanaan terdiri atas penyuluhan, pendampingan, dokumentasi dan evaluasi. Kegiatan pendampingan menghasilkan peningkatan pemahaman mengenai relaksasi kredit dan pengawasan internal bagi pengelola LPD dan Pengawas LPD. Pengabdian ini telah memberikan peningkatkan pemahaman terhadap pengelola terkait pelaksanaan relaksasi kredit untuk debitur LPD Tingkatbatu. Selanjutnya, setelah pengabdian telah terjadi perbaikan pemahaman dan peningkatkan pengetahuan bagi pengawas dalam melaksanakan pengawasan internal berupa audit sederhana dalam

melaksanakan audit untuk meningkatkan pengendalian terhadap kualitas manajemen dan pengelolaan LPD Tingkatbatu.

Key word :

*Counseling,
Credit Relaxation,
Internal
Supervision*

Abstract :

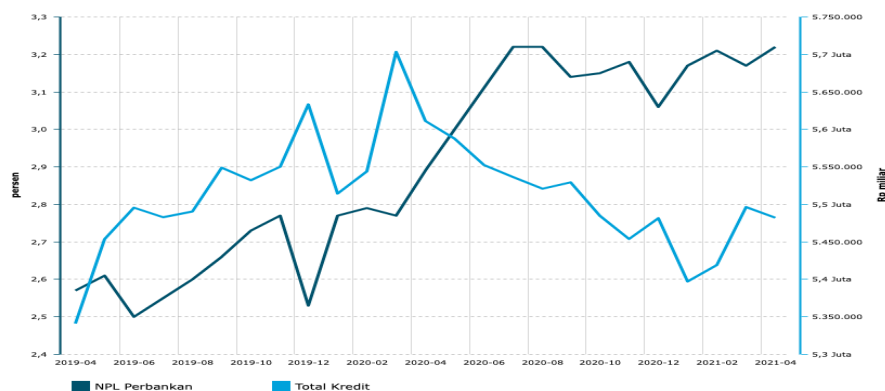
The Village Credit Institution (LPD) is a financial institution owned and managed by a traditional village in Tierbatu Village, Bangli Regency, Bali Province. LPD has long provided support to village communities who have difficulty gaining access to financial institutions such as banks due to problems with guarantees or financial reports. Bad credit and internal supervision are important issues, especially during the pandemic, so this is a challenge for the LPD itself because the trend of bad credit is increasing. This PKM activity aims to provide understanding for managers regarding the implementation of credit relaxation for LPD Kartu Batu debtors, provide understanding and experience for supervisors to carry out internal supervision in the form of simple audits, provide assistance in implementing relaxation and internal supervision by carrying out simple audits. The implementation method consists of counseling, mentoring, documentation and evaluation. Mentoring activities result in increased understanding regarding credit relaxation and internal supervision for LPD managers and LPD Supervisors. This service has provided increased understanding for managers regarding the implementation of credit relaxation for LPD Kartu Batu debtors. Furthermore, after the service there has been an improvement in understanding and increased knowledge for supervisors in carrying out internal supervision in the form of simple audits in carrying out audits to improve control over the quality of management and management of LPD Tanggabatu.

Panduan sitasi / citation guidance (APPA 7th edition) :

Sari, L. A., Kismiyati., Rozi., Falatehan, N., Noviyanti, Y. T., Faradilla, A. P., Aryandini, G. Z., Diklaui, B. T., Arsad, S., & Yusuf, M. (2024). Penerapan Teknologi Akuaponik Pada Budidaya Ikan Nila (*Oreochromis niloticus*) dan Selada (*Lactuca sativa*) Di Lahan Yang Terbatas Di Sentra Wisata Kuliner Deles Merr, Surabaya. *Jurnal Abdi Insani*, 11(1), 13-20. <https://doi.org/10.29303/abdiinsani.v11i1.862>

PENDAHULUAN

Pandemi telah menyebabkan banyak sekali perubahan dan tantangan yang menerpa perekonomian dunia. Hal memberikan shock hebat kepada pelaku usaha dan lembaga keuangan di seluruh dunia termasuk Indonesia. Salah satu lembaga yang terkena imbasnya adalah Lembaga Perkreditan Desa (LPD). LPD menjadi salah satu dari banyak lembaga keuangan yang terkena imbasnya. Pandemi telah menyebabkan banyak sekali lembaga keuangan menghadapi kesulitan karena banyak debiturnya mengalami kesulitan pembayaran kredit. Kesulitan pembayaran kredit jika tidak segera ditangani akan menghasilkan badai keuangan yang hebat jika tetap menerapkan aturan yang berlaku pada saat kondisi normal. Rasio kredit macet yang terjadi selama periode April 2019 sampai April 2021 meningkat relatif signifikan. Pada April tahun 2019 *rasio non performance loan* (NPL) adalah 2,57 persen dengan nilai kredit macet sebesar 5,3 miliar rupiah. Kenaikan NPL pada arpil tahun 2021 menjadi 3,2 persen dengan nilai kredit macet 5,7 miliar.



Gambar 1. Non Performance Loan (NPL) dan Jumlah Kredit Macet Indonesia April 2019 – April 2021
 Sumber: (Katadata.co.id, 2022)

(Pramaitha & Ariana, 2021) menemukan sebuah LPD yang melaksanakan kebijakan relaksasi kredit di masa pandemic, yakni LPD Kesiman. Kebijakan ini diambil untuk meringankan beban khususnya untuk UMKM yang menjadi debitur di LPD Kesiman. Kebijakan relaksasi kredit merupakan sebuah kebijakan yang diambil oleh sebuah lembaga keuangan untuk meringankan beban debitur melalui kelonggaran syarat-syarat kredit secara finansial dan non finansial dari penundaaan sampai dengan perpanjangan waktu sebagai upaya meminimalisir kredit macet (Adha & Joesoef, 2021; Rahayu & Sildawati, 2021; sari et al., 2020; Septianing, 2020; Karim,2021; Asyhadi, 2020; Marwah, 2019). Terdapat Desa Patas Gerogak melaksanakan kebijakan relaksasi kredit untuk pelaku usaha mikro yang dianggap paling merasakan dampak pandemic (Anwar, 2020). Pandemi sudah berjalan kurang lebih tiga tahun. Kondisi lain yang dihadapi adalah isu kebangkrutan LPD yang terjadi di beberapa daerah. Sampai tahun 2021 terdapat 150 LPD yang mengalami kebangkrutan di seluruh bali. Jumlah ini belum termasuk LPD yang mengalami masalah pengelolaan yang belum dapat diselesaikan. Salah satu variabel yang menyebabkan terjadinya kebangkrutan adalah pengawasan internal. Efektifitas pengawasan internal menjadi salah satu penentu keberhasilan LPD dalam menghindari kebangkrutan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan oleh (Bhuaneswari & Damayanti, 2018), diketahui bahwa motivasi, tingkat pendidikan dan pengalaman kerja pengawas internal berpengaruh positif terhadap efektivitas pengendalian internal. Pendidikan dan pengalaman kerja ini sangat tergantung pada ilmu pengetahuan yang dimiliki. Untuk itu dalam rangka meningkatkan pengetahuan yang dimiliki maka jalan keluar yang bisa ditawarkan adalah melalui penyuluhan serta pendampingan pelaksanaan kebijakan relaksasi kredit serta pengawasan internal. Kondisi serupa mengenai permasalahan kredit macet juga dihadapi oleh LPD Tingkatbatu semenjak pandemi terjadi. Peningkatan kredit macet menjadi isu bagi LPD tersebut dan terkait audit internal yang belum dilaksanakan secara berkala dan normatif. LPD masih memiliki kendala terkait dengan pelaksanaan relaksasi kredit untuk kredit macet yang dilaksanakan secara baik. Berdasarkan wawancara diketahui bahwa audit internal belum pernah menjadi perhatian sebagai fungsi pengawasan internal. Untuk perlu dilaksanakan pengabdian masyarakat melalui penyuluhan dan pendampingan bagi pengelola dan pengawas.

Pandemi telah memberikan efek buruk terhadap perekonomian termasuk lembaga keuangan seperti LPD. Hal ini menyebabkan perlu dilaksanakan PKM yang akan memberikan dampak terhadap LPD Tingkatbatu. Terdapat beberapa tujuan kegiatan PKM yang diharapkan berdasarkan latar belakang diatas. Tujuan pengabdian kepada masyarakat ini adalah memberikan pemahaman bagi pengelola terkait pelaksanaan relaksasi kredit bagi debitur LPD Tingkatbatu dan memberikan pemahaman bagi pengawas untuk melaksanakan pengawasan internal berupa audit sederhana

METODE KEGIATAN

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman serta keterampilan pengelola LPD Desa Adat Tingkatbatu, Kecamatan Jehem, Kabupaten Bangli dalam melaksanakan kebijakan restrukturisasi kredit dan pengawasan internal, sehingga metode yang akan digunakan adalah melalui penyuluhan dan pendampingan, serta didahului dengan sosialisasi. Sosialisasi tetap relevan untuk diberikan agar pengelola LPD pada tahap awal dapat menyamakan persepsi mengenai hal-hal yang mendasar, sehingga tahap selanjutnya akan lebih optimal. Adapun proses proses yang akan dilaksanakan sebagai berikut.

1. Penyuluhan

Penyuluhan dapat dipandang sebagai sebuah ilmu dan tindakan praktis. Sebagai sebuah ilmu, pondasi ilmiah penyuluhan adalah ilmu tentang perilaku (*behavioural science*), di dalamnya ditelaah pola pikir, tindak, dan sikap manusia dalam menghadapi kehidupan (Amanah, 2007). Satu dari jenis layanan publik dipenyuluhan yang diselenggarakan, yaitu memberikan informasi kepada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Rivaldo et al., 2007). Penyuluhan ini dilaksanakan untuk memberikan informasi – informasi serta pengetahuan atau aturan yang berlaku sesuai kaidah ilmu yang berlaku. Penyuluhan ini sebagai upaya untuk menyamakan persepsi antara pengelola dan pengawas.

2. Pendampingan

Pendampingan merupakan bagian utama Pengabdian. pendampingan adalah suatu proses pemberian kemudahan atau fasilitas yang diberikan pendamping kepada klien/masyarakat dalam mengidentifikasi kebutuhan dan memecahkan masalah serta mendorong tumbuhnya inisiatif dalam proses pengambilan keputusan (Departemen Sosial, 2009). Pendampingan adalah suatu aktivitas yang dilakukan dan dapat memiliki beberapa arti yakni pembinaan, pengajaran, pengarahan dalam individu atau kelompok yang lebih berkonotasi pada menguasai, mengendalikan, dan mengontrol (BPKP Jawa Timur, 2001). Pendampingan ini merupakan bagian kelanjutan dari penyuluhan. Penyuluhan yang terjadwal tanpa didampingi tidak akan menghasilkan manfaat yang maksimal. Pendampingan akan membantu pengelola untuk menghadapi masalah riil yang terjadi.

3. Dokumentasi

Saat proses penyuluhan dan pendampingan, penting sekali dilaksanakan proses dokumentasi untuk memastikan kegiatan berjalan dengan baik dan lancar. Dokumentasi ini bagian dari justifikasi kegiatan. Setelah selai dilaksanakan dokumentasi, maka kegiatan ini akan dipublikasikan pada koran tribuna Bali yang akan dipublikasikan secara online.

4. Evaluasi

Evaluasi proses pelaksanaan penting dilaksanakan untuk memperbaiki kegiatan penyuluhan di masa depan. Perbaikan-perbaikan ini akan menunjukkan *fed back* penerima penyuluhan yakni LPD Desa Adat Tingkatbatu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses kegiatan terdiri dari beberapa tahapan. Tahapan kegiatan memiliki beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan. Sebagaimana telah dipaparkan pada tahapan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, maka dapat dipaparkan hasil pelaksanaan pada tiap tahapan kegiatan.

1) Tahap Penyuluhan

Pengabdian ini dilaksanakan dua tahapan, tahapan pertama terkait penyuluhan mengenai relaksasi kredit dan tahapan kedua terkait penyuluhan pengawasan internal khususnya terkait audit internal. Setelah dilaksanakan penyuluhan maka tahap selanjutnya adalah tahapan pendampingan. Tahapan ini menjadi sangat penting untuk memastikan apapun materi yang ditransfer diharapkan dapat di implementasikan di LPD Tingkatbatu. Tahapan pertama

penyuluhan akan dilaksanakan pada minggu pertama bulan September hari Jumat, 9 september 2022. Pada tahapan ini dilaksanakan penyuluhan oleh anggota peneliti yang memiliki pengalaman profesional perbankan selama delapan tahun dibidang kredit, yakni oleh Dr. I Made Endra Kartika Yudha., S.E., M.Sc. Berikut merupakan dokumentasi kegiatan.



Gambar 2. Tahap Penyuluhan Kredit dan Pengawasan Internal

Pada penyuluhan tahapan pertama ini diketahui bahwa LPD Desa Tingkadbatu hanya pernah melaksanakan proses kebijakan relaksasi kredit berupa perpanjangan jangka waktu kredit saja. Terdapat beberapa model kebijakan relaksasi kredit yang berupa restrukturisasi kredit yang belum pernah dijalankan dan belum diketahui antara lain seperti penurunan tingkat suku bunga, pengurangan tunggakan bunga, pengurangan denda, penambahabahan kredit, atau konversi kredit kedalam bentuk kredit lain yang meringankan seperti kredit modal kerja yang hanya membayar bunga saja untuk jangka waktu tertentu. Selain itu, pada penyuluhan ini telah memberikan pemahaman bahwa tidak semua debitur layak untuk diberikan relaksasi kredit. Karena terdapat beberapa hal yang wajib diketahui terkait syarat pemberian kebijakan relaksasi adalah debitur mengalami kesulitan pembayaran pokok dan bunga setelah pandemi dan debitur memiliki sumber bayar yang mencukupi baik dari hasil usaha ataupun pendapatan tetap yang dimiliki. Selain itu pemberian relaksasi dipertimbangkan hanya untuk debitur yang mengalami kesulitan setelah terjadi pandemi sebagai bentuk prioritas utama. LPD merupakan lembaga yang dimiliki oleh warga desa adat, sehingga untuk proses relaksasi kredit masih perlu mendapatkan pertimbangan dan persetujuan dari warga desa adat agar tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari. Tahapan pertama menunjukkan gambaran yang baik dan respon yang baik karena tercipta kondisi diskusi yang baik.



Gambar 3. Tahap Penyuluhan Kredit dan Pengawasan Internal

Selanjutnya, pengelola dan pengawas LPD Tingkadbatu menyepakati proses penyuluhan sekaligus pendampingan pengawasan internal di minggu kedua dan ketiga bulan September 2022. Pada tahapan selanjutnya akan dilaksanakan tahapan penyuluhan pengawasan terkait audit internal LPD. Tahapan ini akan membutuhkan narasumber yakni profesional yang telah berpengalaman pada bidang akuntansi dan audit internal. Tahapan ini akan memakan waktu sampai dengan 2 kali pertemuan. Narasumber yang akan digunakan adalah dosen akuntansi FEB Unud yakni I Wayan Gede Wahyu Purna Anggara., S.E., M.Si. Narasumber merupakan dosen dengan pengalaman profesional dibidang akuntansi dan audit internal sebelum menjadi dosen di FEB Unud. Saat melaksanakan penyuluhan dan pendampingan diketahui bahwa badan pengawas (bendesa dan perangkat) belum mengetahui secara rinci bagaimana cara membaca laporan keuangan dan evaluasi dari pelaksanaan oprasional bisnis dari LPD. Setelah penyuluhan dan pendampingan, perlu dilaksanakan audit berkala tidak hanya dilaksanakan dari badan pengawas saja, namun perlu dilaksanakan audit eksternal dari lembaga lain seperti kantor audit publik. Hal ini akan membantu pengawas melaksanakan perbaikan dan evaluasi untuk LPD. Berikut merupakan kegiatan penyuluhan dan pendampingan berasama narasumber I Wayan Gede Wahyu Purna Anggara., S.E., M.Si

2) Tahap pendampingan

Tahap pendampingan merupakan tahapan lanjutan setelah dilaksanakan penyuluhan. Tahap pendampingan ini secara berkala dengan tatap muka dan konsultasi melalui media komunikasi seperti telpon dan whatsapps. Kegiatan pendampingan ini menghasilkan beberapa rekomendasi bagi pengawas dan pengelola mengenai proses relaksasi dan pengawasan internal terkait audit. Proses pendampingan ini dilaksanakan dengan baik. Pengelola dan pembina merasakan bahwa proses pendampingan ini tidak dapat dilaksanakan pada jangka pendek saja, namun perlu pelaksanaan pendampingan untuk jangka panjang mengingat permasalahan semakin kompleks.



Gambar 4. Tahap kegiatan Pendampingan

3) Tahap Dokumentasi

Pada tahapan ini telah dilaksanakan dokumentasi dan publikasi. Pelaksanaan dokumentasi dilaksanakan secara online. Hal ini penting sekali dilaksanakan sebagai bagaian pelaksanaan pengabdian. Dokumentasi memastikan justifikasi kegiatan telah dilaksanakan. Setelah dokumentasi, dilaksanakan publikasi untuk memberikan dorongan kepada banyak pihak untuk melaksanakan kegiatan yang serupa dan dapat memberikan manfaat yang baik terhadap LPD – LPD lain yang tersebar di berbagai desa adat di Provinsi Bali. Berikut merupakan link publikasi pada koran tribun bali. <https://bali.tribunnews.com/2022/11/25/mendukung-stabilitas-keuangan-lembaga-perkreditas-desa-pada-pada-masa-pandemi-krisis-energi-dunia>.

4) Tahap Evaluasi

Kegiatan ini pengabdian sudah berjalan dengan baik kendatipun terdapat hambatan karena terdapat keterbatasan waktu akibat terhalang oleh kegiatan ritual di lokasi pengabdian. Untuk kedepan penting sekali memastikan perencanaan kegiatan yang tepat karena kegiatan ritual di Bali relative banyak dan sangat dinamis. Selanjutnya, penting sekali diberikan pengetahuan mengenai audit lebih dalam, karena kemampuan badan pengawas yang terbatas akibat pengetahuan dan pengalaman yang kurang memadai. Untuk itu perlu dilaksanakan pemantauan lebih lanjut dalam jangka panjang. Pada proses wawancara selama penyuluhan dan pendampingan diketahui bahwa

KESIMPULAN DAN SARAN

Pada observasi dan proses pelatihan terlihat beberapa hal yang sudah dilakukan dan belum dilaksanakan. Pertama, LPD sudah melaksanakan proses relaksasi berupa restrukturisasi seperti perpanjangan jangka waktu kredit saja, namun belum melaksanakan model relaksasi yang lain seperti penurunan tingkat suku bunga atau penghapusan denda, sehingga melalui proses pelatihan dan pendampingan maka proses relaksasi dilaksanakan lebih baik dikemudian dengan lebih baik lagi. Kedua, proses pengawasan internal memang belum maksimal, hal ini karena faktor pengetahuan dan pemahaman serta pengalaman yang belum memadai. Pengabdian ini telah memberikan peningkatan pemahaman terhadap pengelola terkait pelaksanaan relaksasi dan restrukturisasi kredit untuk debitur LPD Tingkatbatu dalam menghadapi pandemi yang terjadi. Setelah dilaksanakan PKM, terjadi juga peningkatan pemahaman dan pengetahuan bagi pengawas dalam melaksanakan pengawasan internal berupa audit sederhana dalam melaksanakan audit untuk meningkatkan pengendalian terhadap kualitas manajemen dan pengelolaan LPD Tingkatbatu. Sehingga ini dirasakan bermanfaat bagi pengelola. Untuk mendukung kegiatan bisnis LPD, maka penting sekali dilaksanakan pendampingan dan pemantauan lebih lanjut dalam jangka panjang. Proses pelaksanaan pendampingan dan evaluasi pada jangka panjang penting dilaksanakan. Untuk itu perlu pendampingan yang lebih intens pada jangka panjang. Konsultasi dan komunikasi lanjutan setelah pengabdian perlu dilaksanakan kembali untuk melihat perkembangan LPD.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terimakasih kami sampaikan kepada Rektor Universitas Udayana, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Ketua LPPM Universitas Udayana, dan Bendesa Adat Desa Tingkat Batu, Pengelola LPD Desa Adat Tingkat Batu, serta seluruh tim yang telah bekerja sama atas terlaksananya kegiatan pengabdian ini. Adapun kegiatan ini masih perlu dievaluasi kembali mengingat masih terdapat tantangan dalam pelaksanaan kegiatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adha, R. A., & Joesoef, I. E. (2021). Penerapan Relaksasi Kredit Bagi Lembaga Pembiayaan Terkait Pandemi Corona di Indonesia. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(2), 370–376.
- AmanahS. (2007). Makna Penyuluhan dan Transformasi Perilaku Manusia. *Jurnal Penyuluhan*, 3(1). <https://doi.org/10.25015/penyuluhan.v3i1.2152>
- Asyhadi, F. (2020). Analisis Dampak Restrukturisasi Kredit Terhadap Pembiayaan (Leasing) Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019. *Justisi: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 43-53.
- Bhuwaneswari, A. A. A. M., & Damayanthi, G. A. E. (2018). Pengaruh Karakteristik Pengawas Internal terhadap Efektivitas Pengendalian Internal Lembaga Perkreditan Desa di Kota Denpasar. *E-Jurnal Akuntansi*, 22(3), 1800-1825.
- BPKB Jawa Timur. (2001). *Modul Pendampingan*, Surabaya.

- Departemen Sosial. (2009). *Bimbingan Teknis PKH*. Jakarta (ID): Departemen Sosial Republik Indonesia.
- Karim, A. (2021). Implementasi Kebijakan Restrukturisasi/Relaksasi Kredit bagi Debitur Terdampak Pandemi Covid 19 dan Akibat Hukumnya bagi Kreditur Terdampak Pandemi Covid 19 di Sektor Perbankan. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 10(2), 211-236.
- Marwah, M. (2019). Relaksasi Kredit Perbankan Di Daerah Wisata Yang Tertimpa Bencana Alam. *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum*, 6(1), 125-134.
- Pramaita, D. A. U., & Ariana, I. K. A. 2021. KEBIJAKAN KERINGANAN KREDIT BAGI NASABAH LPD DESA ADAT KESIMAN PADA MASA PANDEMI COVID-19.
- Rahayu, N. I., & Sildawati, S. (2021, July). Analisis Pemahaman Persepsi Nasabah Terhadap Kebijakan Relaksasi Kredit Diera Covid 19. In *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi, Bisnis & Akuntansi* (Vol. 1, pp. 228-240).
- Rivaldo, Y., Yusman, E., & Sidik, M. (2021). PENYULUHAN KEPADA WIRAUSAHAWAN DALAM UPAYA MENGEMBANGKAN EKONOMI KREATIF. *JURNAL AL TAMADDUN BATAM*, 1(1), 17-20.
- Sari, L. M., Musfiroh, L., & Ambarwati, A. (2020). Restrukturisasi Kredit Bank Daerah X Pada Masa Pademi Covid-19. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen Mutiara Madani*, 8(1), 46-57.
- Septiyaning, T. (2020). Analisis Implementasi Kebijakan Relaksasi Kredit Pada Masa Pandemi Covid-19 Di PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) TBK. *Jurnal Kompetitif Bisnis*, 1(1), 8-8.
- <https://balitribune.co.id/content/dampak-covid-19-ekonomi-melambat-lpd-mulai-berikan-kebijakan-relaksasi-kredit>. Didownload pada tanggal 1 Agustus 2022.
- <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/07/05/terimbas-pandemi-rasio-rasio-kredit-bermasalah-perbankan-semakin-meningkat>. Didownload pada tanggal 1 Juni 2022.